

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

1990, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Achmad Chulaemi, 2013, *Hukum Agraria, Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahannya*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: sinar grafika.

Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andianto Haryoko, 1999, *Aplikasi PJ dan SIG dalam Evaluasi Lahan untuk Pemukiman*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Biro Organisasi dan Kepegawaian, *Panduan Ujian Dinas Tk.I*, 2013.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"*, 20 Mei 2007.

- Boedi Harsono, 1996, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Dianto Bachriadi, Dkk., 1997 *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa Dan Agenda Pembaruan Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusmadi Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetrisno Hadi, 1981, *Metode Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 2);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya;

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174);

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 208);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (absentee) Obyek Redistribusi Landreform;

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

C. Internet

<http://dasar2ilmutanah.blogspot.com.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

<http://www.bpn.go.id/Program/Reforma-Agraria>, html, diakses pada tanggal 27 Juni 2016.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2007/06/07/mengatasi-sengketa-tanah-sesuai-syariah.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016